DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amirruddin, Muhammadiah, Azikin R. 2012. Transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur.*Jurnal Ilmu Pemerintahan*II(1):17-31.

Arfah, J. dan Y. Musin. 2017. Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) dalam Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Konawe. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13(2): 91-107.

Arifiani, T.L., dan S. Sjaf. 2018. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan.*Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 2(3): 317-332.

Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T . 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(3), 2014, 473-485. Jember: Universitas Jember.

Ashari, N. 2013.Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.*Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(3): 1135-1144.

Aslah, S. 2018. *Kasus Lima Desa di Mojokerto Terancam Tak Bisa Cairkan Dana Desa*. Suara Mojokerto. 26 Februari.Mojokerto.

Hamid, A. 2016.Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa). *Tesis*.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Alauddin. Makassar.

Fajri, R., E. Setyowati, dan Siswidiyanto. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik* 3(7): 1099-1104.

Farazman, A. 2009. Building Administrative Capacity for The Age of Rapid Globalization: A Modest Prescription for The Twenty-First Century. *Public Adminstration Review* 69(6): 1007-1020.

Florensi, H.O. 2014.Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.*Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 2(1): 1-8.

Gayatri, M.Y. Latrini, dan N.L.S. Widhiyani. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10 (2): 175-182.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*.Edisi 8. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Hetifah Sj. Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hupe, P dan Hill, M. 2007.Street-Level Bureaucracy and Public Accountability.*Journal Public Administration*, 85(2): 219-229.

Iqsan. 2016. Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan* 4: 230-240.

Khairuddin. 2000. Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi, Perencanaan, Liberty: Yogyakarta.

Kholmi, Masiyah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 07(02): 143-152.

Kisnawati B, Y. Astini, dan R.N. Oktaviani. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram. 15(1): 1-10.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Kajian Sistem terhadap Pengelolaan Keuangan Desa maupun Dana Desa*. Jakarta.

Loina,Lalolo Krina P. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Manaan, Febriani,, Vina, Fransisca, Maria. 2017. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul. *Skripsi*.Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

Meutia, I. dan Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8(2): 227-429.

Miftahudin. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*.Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.

Muslimin,& et al. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan bangkala Kabupaten Jeneponto.*Jurnal Ilmu Pemerintahan*II(1): 79-85.

Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*.Jakarta(ID): Salemba Empat.

Nurmawati, R. 2017. *Bupati Mojokerto Ingatkan Kades untuk Terapkan Prinsip Akuntabilitas dalam Pemanfaatan Dana Desa*. Tribun Mojokerto. 24 Agustus.Mojokerto.

Peraturan Bupati Mojokerto No. 2 Tahun 2017 *Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017*.

_____No. 2 Tahun 2018 *Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018*.

_____No. 7 Tahun 2015*Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014*Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 *Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.

_____Nomor 60 Tahun 2014 *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Permendes No. 5 Tahun 2015*Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

Rahman, A. 2015.Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Prespektif Akuntabilitas di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.

Rahmawati, E.N. 2014.Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).*Skripsi*.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Rohmah, K.T. 2016.Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.*Skripsi*.Program S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.

Romantis, P.A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.*Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah.*

Ryandi, D. 2019. *Kades Sikat Ratusan Juta Dana Desa untuk Kongkow dan Mancing*.Jawa Pos. 25 Januari. Surabaya.

Safrijal, M., M.N. Basyah, dan H. Ali. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1(1): 176-191.

Scott, C. 2000. Accountability in The Regulatory State. *Journal of Law and Society* 27(1): 38-60.

Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Sugista, R.A. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*Desa*.

_____Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*.

Via, V. Z. 2015. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2013). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Jember. Jember.

Wardana, I. 2016. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuagan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang).*Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Widayat, B. 2018.*Korupsi Dana Desa, Kepala Desa di Mojokerto dijebloskan ke Penjara*. Merdeka.5 Juli. Jakarta.